


Analisis Implementasi Rencana Strategis (Renstra) Kementerian dan Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan

Muamar Asykur^{1*}, Rahmad Nur Hidayat², Aiman Abu Khair², Muliadi²,
Muhammad Arief AR²

¹Universitas Megarezky Makassar, Indonesia

²Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Corresponding Author  muamarasykur@unmerz.ac.id^{*1}

ABSTRACT

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian dan Pemerintah Daerah merupakan instrumen perencanaan jangka menengah yang berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan pendidikan nasional dan daerah. Renstra disusun untuk menerjemahkan visi, misi, serta tujuan pembangunan pendidikan ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan yang terukur, khususnya dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Kebijakan dan arah strategis Renstra pendidikan diarahkan pada pemenuhan dan peningkatan Standar Nasional Pendidikan (SNP), peningkatan kualitas pembelajaran dan kompetensi lulusan, penguatan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan, serta pemerataan akses pendidikan bermutu. Implementasi Renstra ditinjau dari aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi menunjukkan bahwa perencanaan berbasis data, pelaksanaan program yang terkoordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta evaluasi berbasis indikator kinerja menjadi faktor penting dalam menjamin efektivitas kebijakan pendidikan. Namun, implementasi Renstra juga dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung dan penghambat, seperti komitmen kepemimpinan, ketersediaan sumber daya, sinkronisasi kebijakan, keterbatasan anggaran, ketimpangan sumber daya manusia, serta lemahnya koordinasi dan sistem evaluasi. Secara keseluruhan, implementasi Renstra yang didukung oleh sinergi kebijakan pusat dan daerah, partisipasi pemangku kepentingan, serta sistem monitoring dan evaluasi yang akuntabel mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan, merata, dan berkeadilan di seluruh wilayah Indonesia.

Kata Kunci: Rencana Strategis, Kebijakan Pendidikan, Implementasi Renstra, Mutu Pendidikan, Pemerintah Daerah.

Article Info

Article History:

Received

September 25,
2025 Revised

November 30,
2025

Accepted
Desember 30,
2025

Journal Homepage <http://ojs.staialfurqan.ac.id/alqiyam>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Published by Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan nasional karena berperan strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing, dan berkarakter. Kualitas pendidikan yang baik akan berkontribusi langsung terhadap kemajuan sosial, ekonomi, dan budaya suatu bangsa. Oleh karena itu, peningkatan mutu pendidikan menjadi agenda prioritas pemerintah yang harus direncanakan dan dilaksanakan secara sistematis, terarah, dan berkelanjutan (Kemendikbudristek, 2020).

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, perencanaan pembangunan nasional dilaksanakan secara berjenjang melalui dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan.

Salah satu dokumen penting dalam perencanaan jangka menengah adalah Rencana Strategis (Renstra) yang disusun oleh kementerian dan lembaga, termasuk pemerintah daerah. Renstra berfungsi sebagai pedoman dalam merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, termasuk di sektor pendidikan, selama periode lima tahunan (Bappenas, 2020).

Renstra pendidikan disusun untuk menjamin keterpaduan antara kebijakan nasional dan pelaksanaannya di daerah. Pada tingkat pusat, Renstra Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan pendidikan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024. Renstra tersebut menekankan peningkatan mutu pembelajaran, penguatan karakter peserta didik, pemerataan akses pendidikan, serta penguatan tata kelola pendidikan yang akuntabel dan transparan (Kemendikbudristek, 2020).

Sementara itu, pada tingkat daerah, pemerintah daerah melalui dinas pendidikan menyusun Renstra sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra pemerintah daerah menjadi instrumen penting dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan nasional sesuai dengan kebutuhan, potensi, dan karakteristik daerah masing-masing. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan pendidikan nasional sangat dipengaruhi oleh efektivitas implementasi Renstra di tingkat daerah (Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, 2021).

Implementasi Renstra dalam bidang pendidikan diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan pendidikan yang masih dihadapi, seperti ketimpangan mutu pendidikan antarwilayah, rendahnya capaian hasil belajar peserta didik, keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan, serta belum optimalnya kualitas dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan. Oleh karena itu, Renstra harus disusun dan dilaksanakan secara berbasis data, kinerja, dan kebutuhan riil di lapangan agar mampu mendorong peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan (Sani, 2015).

Namun demikian, dalam praktiknya, implementasi Renstra pendidikan belum sepenuhnya berjalan optimal. Berbagai kendala masih ditemukan, antara lain perbedaan kapasitas fiskal dan sumber daya manusia antar daerah, lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta keterbatasan sistem monitoring dan evaluasi. Selain itu, dinamika perubahan kebijakan nasional dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat juga memengaruhi efektivitas pelaksanaan Renstra pendidikan di lapangan (Bappenas, 2020).

Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan kajian dan analisis yang komprehensif terhadap implementasi Rencana Strategis (Renstra) kementerian dan pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Analisis ini penting untuk mengetahui sejauh mana Renstra telah diimplementasikan sesuai dengan perencanaan, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan pendidikan di masa mendatang. Oleh karena itu, makalah ini disusun dengan fokus pada analisis implementasi Renstra kementerian dan pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu pendidikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif berbasis studi kepustakaan (library research). Fokus penelitian adalah menganalisis data historis mengenai Dinasti Abbasiyah dari berbagai sumber primer dan sekunder. Data dikumpulkan melalui kajian literatur terhadap buku, artikel jurnal, dokumen sejarah, dan sumber digital terpercaya yang relevan dengan tema penelitian.

Penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan, seperti terlihat pada diagram di bawah ini:



Gambar 1. Diagram Alur Penelitian

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Dan Arah Strategis Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Dan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan

Rencana Strategis (Renstra) pendidikan merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman bagi Kementerian dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan pendidikan. Renstra disusun untuk menerjemahkan visi, misi, serta tujuan pembangunan pendidikan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan yang terukur. Dalam konteks peningkatan mutu pendidikan, Renstra berperan sebagai instrumen strategis untuk memastikan terselenggaranya pendidikan yang bermutu, merata, dan berkelanjutan (Kemdikbudristek, 2020).

Kebijakan umum Renstra Kementerian di bidang pendidikan diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan dan peningkatan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Kebijakan ini mencakup penguatan standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, serta sistem penilaian pendidikan. Pemenuhan SNP menjadi landasan utama dalam upaya peningkatan mutu pendidikan secara nasional (Permendikbud No. 28 Tahun 2016).

Arah strategis Renstra Kementerian dalam meningkatkan mutu pendidikan difokuskan pada peningkatan kualitas pembelajaran dan kompetensi lulusan. Hal ini diwujudkan melalui pengembangan kurikulum yang adaptif dan kontekstual, penguatan literasi dan numerasi, serta penanaman karakter peserta didik. Kebijakan Merdeka Belajar menjadi pendekatan strategis dalam menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman (Kemdikbudristek, 2020).

Selain itu, Renstra Kementerian juga menekankan peningkatan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan sebagai faktor kunci peningkatan mutu pendidikan. Pemerintah

mengarahkan kebijakan pada pengembangan kompetensi guru melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, serta peningkatan kesejahteraan. Guru diposisikan sebagai aktor utama dalam transformasi pembelajaran dan peningkatan mutu satuan pendidikan (Sani, 2015).

Di sisi lain, Renstra Pemerintah Daerah di bidang pendidikan disusun dengan mengacu pada kebijakan nasional, namun disesuaikan dengan kondisi, potensi, dan kebutuhan daerah. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam pengelolaan pendidikan dasar dan menengah, sehingga kebijakan daerah difokuskan pada pemerataan akses pendidikan bermutu, peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, serta penguatan manajemen berbasis sekolah (Undang-Undang No. 23 Tahun 2014).

Arah strategis pemerintah daerah dalam peningkatan mutu pendidikan juga diarahkan pada penguatan sistem penjaminan mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Pemerintah daerah berperan dalam pembinaan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan standar nasional pendidikan agar mutu pendidikan dapat terjaga dan meningkat secara berkelanjutan. Penguatan kapasitas kepala sekolah dan pengawas sekolah menjadi bagian penting dalam strategi ini (Mulyasa, 2017).

Keberhasilan peningkatan mutu pendidikan melalui Renstra sangat ditentukan oleh sinergi antara kebijakan Kementerian dan Pemerintah Daerah. Sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan program, serta evaluasi berbasis data menjadi kunci agar kebijakan pusat dapat diimplementasikan secara efektif di daerah. Dengan sinergi tersebut, Renstra diharapkan mampu mendorong peningkatan mutu pendidikan secara merata dan berkeadilan di seluruh wilayah Indonesia (Bappenas, 2020).

Implementasi Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Dan Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Ditinjau Dari Aspek Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Evaluasi Program

1. Implementasi Renstra Ditinjau dari Aspek Perencanaan

Perencanaan merupakan tahap awal dan fondasi utama dalam implementasi Renstra pendidikan. Pada tingkat kementerian, perencanaan Renstra disusun dengan mengacu pada RPJMN serta kebijakan nasional pendidikan yang berorientasi pada peningkatan akses, mutu, dan relevansi pendidikan. Renstra Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025–2029 menekankan perencanaan berbasis data, penetapan sasaran strategis yang terukur, serta penguatan indikator kinerja sebagai alat pengendali mutu pendidikan (Kemendikdasmen, 2025).

Di tingkat pemerintah daerah, perencanaan Renstra Dinas Pendidikan diselaraskan dengan RPJMD dan disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan daerah. Perencanaan ini mencakup identifikasi permasalahan pendidikan daerah, pemetaan mutu pendidikan, serta penentuan program prioritas yang mendukung peningkatan mutu layanan pendidikan (Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, 2025). Selain itu, perencanaan Renstra pendidikan saat ini semakin diarahkan pada pendekatan perencanaan berbasis data, seperti data Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan hasil evaluasi mutu pendidikan, sehingga program yang dirancang lebih tepat sasaran dan berdampak langsung pada peningkatan mutu (BBPMP Jatim, 2024).

2. Implementasi Renstra Ditinjau dari Aspek Pelaksanaan

Pelaksanaan Renstra merupakan tahapan operasional dari perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Pada tingkat kementerian, pelaksanaan Renstra diwujudkan melalui rencana kerja tahunan, penganggaran berbasis kinerja, serta pelaksanaan program strategis seperti peningkatan kompetensi pendidik, penguatan kurikulum, dan penjaminan mutu pendidikan (Kemendikdasmen, 2025).

Di tingkat pemerintah daerah, pelaksanaan Renstra dilakukan oleh Dinas Pendidikan melalui implementasi program dan kegiatan yang selaras dengan kebijakan nasional. Pelaksanaan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti sekolah, pengawas, tenaga pendidik, dan masyarakat, guna memastikan program berjalan efektif dan berkelanjutan (Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, 2025).

Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan Renstra pendidikan. Pendampingan teknis oleh Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) kepada pemerintah daerah merupakan salah satu bentuk dukungan implementatif untuk memastikan pelaksanaan program sesuai standar mutu yang ditetapkan (BBPMP Jatim, 2024).

3. Implementasi Renstra Ditinjau dari Aspek Evaluasi

Evaluasi merupakan bagian integral dari implementasi Renstra pendidikan yang bertujuan untuk menilai efektivitas dan capaian program. Evaluasi dilakukan secara berkala melalui pemantauan indikator kinerja, capaian sasaran strategis, serta efisiensi penggunaan anggaran pendidikan (Kemendagri, 2023).

Hasil evaluasi Renstra digunakan sebagai dasar untuk perbaikan dan penyesuaian program, baik pada tahun berjalan maupun dalam penyusunan Renstra periode berikutnya. Evaluasi yang sistematis memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi kendala implementasi serta merumuskan solusi strategis guna meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan (Kemendagri, 2023).

Dengan adanya evaluasi yang akuntabel dan transparan, implementasi Renstra pendidikan dapat berjalan lebih adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat dan perkembangan kebijakan pendidikan nasional.

Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Implementasi Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Dan Pemerintah Daerah Serta Dampaknya Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun oleh kementerian dan pemerintah daerah sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan, termasuk di bidang pendidikan. Renstra memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan pendidikan selama periode tertentu. Dalam konteks pendidikan, Renstra berfungsi sebagai instrumen kebijakan untuk menjamin ketercapaian peningkatan mutu pendidikan secara sistematis dan berkelanjutan (Kemendikbudristek, 2020).

Implementasi Renstra pendidikan bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan pendidikan berjalan selaras dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) serta

mendukung pencapaian target pembangunan pendidikan nasional dan daerah. Namun, keberhasilan implementasi Renstra sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung dan penghambat yang muncul dalam proses pelaksanaannya (Bappenas, 2020).

1. Faktor Pendukung Implementasi Renstra

Keberhasilan implementasi Renstra dalam meningkatkan mutu pendidikan tidak terlepas dari adanya faktor-faktor pendukung yang memperkuat pelaksanaan program strategis pendidikan.

Pertama, komitmen dan kepemimpinan pimpinan menjadi faktor utama dalam implementasi Renstra. Pimpinan kementerian dan pemerintah daerah yang memiliki komitmen tinggi mampu memastikan konsistensi kebijakan, keberlanjutan program, serta pengalokasian sumber daya secara tepat sasaran. Kepemimpinan yang efektif juga mendorong terciptanya budaya kerja yang berorientasi pada mutu pendidikan (Mulyasa, 2021).

Kedua, ketersediaan sumber daya baik sumber daya manusia, anggaran, maupun sarana dan prasarana pendidikan menjadi faktor pendukung penting. Guru dan tenaga kependidikan yang kompeten, didukung oleh pembiayaan yang memadai, memungkinkan program peningkatan mutu pendidikan dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target Renstra (Kemendikbudristek, 2021).

Ketiga, sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah turut mendukung implementasi Renstra. Keselarasan antara kebijakan nasional dan kebijakan daerah mempermudah pelaksanaan program pendidikan serta menghindari tumpang tindih kegiatan. Sinkronisasi ini juga memastikan bahwa prioritas pembangunan pendidikan nasional dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan daerah (Bappenas, 2020).

Keempat, partisipasi dan dukungan pemangku kepentingan seperti kepala sekolah, guru, komite sekolah, orang tua, dan masyarakat berperan besar dalam keberhasilan implementasi Renstra. Keterlibatan stakeholder menciptakan rasa memiliki terhadap program pendidikan dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan pendidikan di tingkat satuan pendidikan (Hasanah, 2022).

2. Faktor Penghambat Implementasi Renstra

Di samping faktor pendukung, implementasi Renstra pendidikan juga menghadapi berbagai faktor penghambat yang dapat mengurangi efektivitas pencapaian tujuan peningkatan mutu pendidikan.

Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan anggaran dan sarana prasarana pendidikan, khususnya di daerah dengan kemampuan fiskal yang rendah. Keterbatasan ini menyebabkan beberapa program prioritas tidak dapat dilaksanakan secara optimal atau mengalami penundaan (Kemendagri, 2021). Selain itu, kualitas dan pemerataan sumber daya manusia yang belum optimal juga menjadi hambatan dalam implementasi Renstra. Masih terdapat ketimpangan distribusi guru dan tenaga kependidikan antarwilayah, serta rendahnya kompetensi sebagian pendidik akibat kurangnya pelatihan dan pengembangan profesional berkelanjutan (Sani et al., 2019). Hambatan lainnya adalah lemahnya koordinasi dan kompleksitas birokrasi. Koordinasi yang kurang efektif antarunit kerja dan prosedur birokrasi yang panjang sering menghambat kelancaran pelaksanaan program pendidikan, sehingga capaian indikator kinerja Renstra tidak optimal (Mulyasa, 2021).

Di samping itu, monitoring dan evaluasi yang belum optimal juga menjadi faktor penghambat. Tanpa sistem pengawasan dan evaluasi yang terencana dan berkelanjutan, pelaksanaan program sulit dikendalikan dan tidak berbasis pada data yang akurat untuk perbaikan mutu pendidikan (Kemendikbudristek, 2020).

3. Dampak Implementasi Renstra terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan

Implementasi Renstra yang didukung oleh faktor-faktor pendukung dan mampu meminimalkan hambatan memberikan dampak positif terhadap peningkatan mutu pendidikan. Salah satu dampaknya adalah meningkatnya kualitas layanan pendidikan, baik dari aspek proses pembelajaran, manajemen sekolah, maupun pemanfaatan sumber daya pendidikan secara lebih efisien (Bappenas, 2020).

Selain itu, Renstra mendorong peningkatan kinerja satuan pendidikan melalui penetapan target kinerja yang jelas dan terukur. Sekolah dan dinas pendidikan memiliki arah yang jelas dalam mencapai Standar Nasional Pendidikan, sehingga mutu pendidikan dapat meningkat secara bertahap dan berkelanjutan (Kemendikbudristek, 2021).

Implementasi Renstra juga berkontribusi terhadap penguatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pendidikan. Program dan penggunaan anggaran pendidikan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pendidikan (Hasanah, 2022).

Pada akhirnya, Renstra yang diimplementasikan secara konsisten memungkinkan terwujudnya peningkatan mutu pendidikan yang berkelanjutan, karena pelaksanaan program selalu melalui siklus perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut yang terintegrasi (Sani et al., 2019).

KESIMPULAN

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian dan Pemerintah Daerah merupakan instrumen kebijakan yang memiliki peran strategis dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Renstra menjadi pedoman perencanaan jangka menengah yang mengarahkan seluruh program dan kegiatan pendidikan agar selaras dengan visi pembangunan nasional serta berorientasi pada pemenuhan dan peningkatan Standar Nasional Pendidikan.

Kebijakan dan arah strategis Renstra Kementerian difokuskan pada peningkatan kualitas pembelajaran, penguatan kompetensi lulusan, peningkatan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan, serta penguatan tata kelola dan sistem penjaminan mutu pendidikan. Sementara itu, Renstra Pemerintah Daerah berperan sebagai instrumen implementatif yang menyesuaikan kebijakan nasional dengan kondisi dan kebutuhan daerah, terutama dalam pemerataan akses pendidikan bermutu, peningkatan kualitas satuan pendidikan, dan penguatan manajemen berbasis sekolah.

Sinergi antara kebijakan Renstra Kementerian dan Pemerintah Daerah menjadi kunci keberhasilan peningkatan mutu pendidikan. Melalui perencanaan yang terintegrasi, pelaksanaan program yang berbasis data, serta evaluasi yang berkelanjutan, Renstra diharapkan mampu mendorong peningkatan mutu pendidikan secara merata, berkeadilan, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

Implementasi Renstra Kementerian dan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan mutu pendidikan memerlukan keterpaduan antara perencanaan yang berbasis data, pelaksanaan program yang konsisten dan kolaboratif, serta evaluasi yang berkelanjutan. Ketiga aspek tersebut saling

terkait dan menentukan keberhasilan pencapaian mutu pendidikan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Oleh karena itu, sinergi kebijakan pusat dan daerah serta komitmen seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor kunci dalam mewujudkan tujuan strategis pendidikan nasional.

Implementasi Renstra Kementerian dan Pemerintah Daerah dalam bidang pendidikan dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung meliputi komitmen pimpinan, ketersediaan sumber daya, sinkronisasi kebijakan, serta partisipasi pemangku kepentingan. Sementara itu, faktor penghambat mencakup keterbatasan anggaran, kualitas SDM yang belum merata, lemahnya koordinasi birokrasi, dan kurang optimalnya monitoring dan evaluasi. Implementasi Renstra yang efektif memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan mutu pendidikan, baik dari sisi layanan, kinerja institusi, maupun keberlanjutan pembangunan pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas. (2020). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
- BBPMP Jawa Timur. (2024). *Menguatkan perencanaan pendidikan melalui evaluasi dan strategi yang terukur*. Surabaya: BBPMP Jawa Timur.
- Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto. (2025). *Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025–2029*. Mojokerto: Dispendik Kab. Mojokerto.
- Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. (2021). *Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021–2026*. Tanjungpinang: Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau.
- Hasanah, E. (2022). *Manajemen strategik pendidikan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Kemendagri. (2021). *Pedoman penyusunan rencana strategis perangkat daerah*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Kemendikbudristek. (2020). *Rencana Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2020–2024*. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Kemendikbudristek. (2020). *Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020–2024*. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Kemendikbudristek. (2021). *Indikator kinerja utama bidang pendidikan*. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Kementerian Dalam Negeri. (2023). *Pedoman penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi rencana strategis perangkat daerah*. Jakarta: Kemendagri.
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2025). *Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 19 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025–2029*. Jakarta: Kemendikdasmen.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2020). *Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020–2024*. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Mulyasa, E. (2017). *Manajemen Pendidikan Karakter*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mulyasa, E. (2021). *Manajemen dan kepemimpinan kepala sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara
- Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.

Sani, R. A. (2015). *Penjaminan Mutu Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sani, R. A., Pramuniati, I., & Mucktiany, A. (2019). *Penjaminan mutu sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.